

KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN PENGARUH KEAMANAN DI KRIMEA

Agustinus Dedy Prasetyo¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Krimea, yang terletak di Semenanjung Laut Hitam dan berpenduduk sekitar 2,3 juta orang, mayoritas berasal dari Rusia dan berbahasa Rusia, telah menjadi pusat sentimen pro-Rusia di Ukraina. Meski Rusia menguasai Krimea sejak 1783, wilayah ini menjadi bagian Ukraina setelah runtuhnya Uni Soviet. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan ketegangan di Kiev meningkatkan kekhawatiran Rusia terhadap keamanan etnis Rusia di Krimea. Rusia mencaplok Krimea untuk mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur dan memperkuat pertahanan karena kepentingan sosial, politik, kultural, ekonomi, serta keamanan—termasuk populasi berbahasa Rusia, potensi strategis, sejarah budaya, sumber daya alam, dan ancaman keamanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia dalam mempertahankan pengaruh di Krimea dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, kultural, ekonomi, dan keamanan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses sosial di balik kebijakan luar negeri Rusia terkait Krimea, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan digunakan untuk memahami lebih dalam makna fenomena tersebut.

Kata kunci : Rusia, Ukraina, Krimea, keamanan, Nato

ABSTRACT

Crimea, located on the Black Sea Peninsula and home to around 2.3 million people, the majority of whom are of Russian origin and Russian-speaking, has become a center of pro-Russian sentiment in Ukraine. Although Russia has controlled Crimea since 1783, the region became part of Ukraine after the collapse of the Soviet Union. Ukraine's desire to join NATO and tensions in Kiev are raising Russian concerns for the security of ethnic Russians in Crimea. Russia annexed Crimea to maintain its influence in Eastern Europe and strengthen its defense due to social, political, cultural, economic, and security interests-including the Russian-speaking population, strategic potential, cultural history, natural resources, and security threats. The results of this study show that Russia's foreign policy in maintaining influence in Crimea is influenced by complex social, political, cultural, economic and security factors. This research aims to analyze the social process behind Russia's foreign policy regarding Crimea, using a descriptive qualitative method. The data collection technique is done through literature study, while data analysis includes reduction, presentation, and conclusion drawing. Validity tests were used to understand the deeper meaning of the phenomenon.

Keywords: Russia, Ukraine, Crimea, security, Nato

PENDAHULUAN

Negara berdaulat adalah wilayah dengan kekuasaan tertinggi yang tidak dipengaruhi oleh negara lain. Untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, negara memperkuat kekuatan militernya guna menghindari ancaman dan hegemoni dari negara

besar. Negara-negara besar sering kali menerapkan berbagai cara untuk memenuhi kepentingan nasional mereka, termasuk melanggar kebebasan negara lain dalam hal wilayah dan pengaruh, yang dapat menyebabkan konflik. (Wibowo, 2017)

Banyak konflik pecah antar negara karena persaingan memperebutkan wilayah, pengaruh dan pengerahan ribuan tentara, termasuk konflik di Semenanjung Krimea, yakni antara Ukraina dengan Rusia dan pakta pertahanan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). (Muhammad, 2015) Ukraina adalah negara terbesar kedua di bekas Uni Soviet setelah Rusia. Wilayah Ukraina merupakan wilayah yang sangat strategis bagi Rusia karena letak geografisnya yang dapat menjadi benteng pertahanan Rusia dan jalur penetrasi Rusia ke Eropa. (Hatton, 2010)

Ukraina merupakan negara yang berbatasan langsung di sebelah Barat sekaligus eks Uni Soviet sebelum akhirnya terpecah. Konflik yang terjadi di Ukraina merupakan konflik internal akibat ketidakmampuan negara dalam menjalankan perannya. Konflik ini bermula dari konflik internal di Ukraina, kemudian meluas menjadi konflik antarnegara, karena konflik ini melibatkan Rusia dan banyak pihak diluar negara-negara yang berkonflik, yang merasa perdamaian dan keamanannya terancam oleh konflik tersebut. (Kamasa, n.d.)

Terpilihnya Viktor Yanukovych sebagai presiden Ukraina pada 2010 memudahkan Rusia memenuhi kepentingan nasionalnya, karena Yanukovych yang pro-Rusia memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan antara Ukraina dan Rusia. Letak geografis dan nilai sejarah Ukraina juga strategis bagi Rusia. Kerja sama Rusia-Ukraina dimulai pada November 1990 dengan perjanjian persahabatan antara Boris Yeltsin dan Leonid Kravchuk di Kiev, yang menegaskan kedaulatan masing-masing negara. Rusia, dengan sumber energi fosil melimpah, menjadi pemasok energi utama bagi Eropa dan menggunakan ini untuk memperkuat pengaruhnya di negara-negara Commonwealth of Independent States (CIS).

Rusia, pemilik cadangan gas alam terbesar sebesar 37,4 triliun meter kubik, membangun jaringan pipa energi melalui Ukraina untuk menyuplai Eropa, dengan tujuan memutus jalur distribusi dan menekan biaya. Rusia menandatangani kontrak sewa dengan Ukraina yang mencakup hak membangun armada angkatan laut di Sevastopol serta

potongan harga gas alam untuk Ukraina, yang juga memberikan harga transportasi energi yang murah.

Krimea sendiri merupakan daerah otonom yang memiliki parlemen sendiri, namun Krimea secara fisik dan politik tetap berada dalam wilayah kedaulatan Ukraina. (Oktorino, 2022) Krimea adalah sebuah kota di Ukraina yang menjadi pusat sentimen pro-Rusia di Ukraina. Wilayah ini terletak di semenanjung Laut Hitam dan berpenduduk sekitar 2,3 juta orang, yang sebagian besar berasal dari Rusia dan berbicara bahasa Rusia. (Walter, 2022). Rusia sendiri telah menjadi kekuatan dominan di Krimea selama 200 tahun, menguasai kota tersebut pada tahun 1783, meskipun pada akhirnya menjadi milik Ukraina sejak runtuhnya Uni Soviet. (Sudibyo, Lintank Wahyu, 2018)

Menurut sensus 2001, etnis Ukraina membentuk 24,32% populasi Krimea, sedangkan orang Rusia 58,32% dan Tatar 12,03%. Meski secara hukum Krimea adalah bagian dari Ukraina, Rusia berjanji menjaga integritas wilayah Ukraina dalam nota kesepahaman 1994 yang juga ditandatangani oleh AS, Inggris, dan Prancis. Rusia sendiri juga memiliki pangkalan angkatan laut yang besar di kawasan Krimea, tepatnya di Sevastopol, salah satu tempat Rusia menempatkan Armada Laut Hitamnya. (Andayani, 2022).

Menurut perjanjian sewa Rusia-Ukraina, Rusia harus memberi tahu Ukraina sebelum melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Namun, Rusia mengerahkan pasukan ke Krimea tanpa pemberitahuan setelah konflik. Sevastopol, ditemukan oleh Kaisar Rusia Yekaterina, memiliki pelabuhan dalam 30m yang ideal untuk pangkalan angkatan laut. Pada 1954, Khrushchev menyerahkan Sevastopol dan Krimea ke Republik Sosialis Soviet Ukraina. Setelah Uni Soviet bubar, Krimea tetap bagian Ukraina, dan Rusia mengakui kepemilikan Sevastopol serta kedaulatan Ukraina berdasarkan Traktat Persahabatan 1997.

Rusia serius menanggapi keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan menggulingkan Presiden Yanukovych, karena mengancam keamanan etnis Rusia di Krimea. Selain mempertahankan pengaruhnya di Eropa Timur, Rusia melihat Ukraina sebagai benteng pertahanan di Laut Hitam dan pasar gas utama. Rusia memperkuat pertahanan di Krimea untuk kepentingan sosial (populasi berbahasa Rusia), politik

(potensi strategis), kultural (sejarah dan budaya), ekonomi (sumber daya alam), dan keamanan (ancaman dari negara lain).

Penelitian ini berfokus pada strategi Rusia dalam memperkuat pengaruhnya di Krimea, dengan judul tesis “Kebijakan Luar Negeri Rusia Dalam Mempertahankan Pengaruh Keamanan di Krimea.” Peneliti tertarik untuk menganalisis **“Bagaimana kebijakan luar negeri Rusia dalam mempertahankan pengaruh keamanan di Krimea?”** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan luar negeri Rusia dalam mempertahankan pengaruh keamanan di Krimea dengan memahami teori dan pendekatan yang relevan serta mengkaji proses sosial yang mendasarinya. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan yaitu seperti Penelitian Renny Candradewi berjudul "What Russia Wants For Ukraine Is To Consider Its Interest" menjelaskan bahwa konflik di Krimea pada Februari 2014 disebabkan oleh desakan Rusia untuk melindungi kepentingan nasionalnya, dengan fokus pada kepentingan Rusia dan transisi politik di Ukraina serta dampaknya pada struktur geopolitik Eropa Timur.(Candradewi, 2023) Dan Penelitian Trisnawati Bandamiasih berjudul "Keterlibatan Rusia Dalam Konflik di Krimea Tahun 2014" menjelaskan bahwa konflik di Kiev disebabkan oleh pembatalan kerja sama ekonomi antara Ukraina dan Uni Eropa, yang memicu kemarahan oposisi terhadap Presiden Viktor Yanukovych dan berujung pada kudeta.(Trisnawati Bandamiasih, 2015) Serta Peneliti terdahulu yang ditulis oleh Probo Darono Yakti yang berjudul “Kebutuhan Uni Eropa Terhadap Institusi Keamanan: Peranan NATO di Era Kontemporer.” Jurnal ilmiah ini membahas tentang kebutuhan Uni Eropa di era modern dalam hal keamanan regional.(Yakti, 2016)

Penelitian ini memandang negara adalah aktor yang mencari kekuasaan dan kepentingan nasional. Penelitian ini menganalisis kepentingan nasional, politik luar negeri dan keamanan nasional sangat berkaitan. Dengan metode kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan data berdasarkan studi pustaka dengan teknik analisis yang relevan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta uji keabsahan yang relevan untuk menganalisis peristiwa yang terjadi.

PEMBAHASAN

Salah satu negara pecahan Uni Soviet yang paling luas adalah Rusia. Rusia mewarisi 2/3 wilayah Uni Soviet, yang memiliki sekitar 50% populasi dan 50% aset dalam bidang ekonomi dan persenjataan. Untuk mencapai tujuan menjadi negara adidaya, Rusia meningkatkan kekuatan di berbagai bidang. Rusia memiliki 17.075.200 km². Geografisnya, negara ini berada di Benua Asia. Ini mencakup kutub utara dan berbatasan dengan Eropa Barat. Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Belarusia, Ukraina, Georgia, Abkhazia, Ossetia Selatan, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Tiongkok, dan Korea Utara adalah negara-negara yang berbatasan dengan Rusia. (Saputra, 2014) Rusia memiliki banyak sumber daya alam. Selain minyak dan gas, negara itu juga memiliki sumber daya industri seperti fosfat, berlian, dan logam berharga. Tidak banyak lahan pertanian di wilayah Utara Rusia. Namun, banyak lahan pertanian terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, di sepanjang perbatasan Ukraina dan Kazakhstan, di selatan dan barat Siberia, dan di sepanjang batas Kazakhstan dan Ukraina. Produksi pertanian di Rusia terbatas karena musim yang pendek dan kekurangan tanah yang subur. Pada tahun 2005, 7,2% tanah dianggap subur, 45% di antaranya adalah hutan, dan 0,1% terdiri dari tanaman permanen.

Rusia terletak di tengah-tengah benua Asia dan Eropa bagian Timur. Rusia juga memiliki beberapa pulau. Ini termasuk Novaya Zemlya, Kepulauan New Siberian, daratan Frans-Josef, Kepulauan Kuril, Pulau Wrangel di Samudera Arktik, dan Sakhalian. Rusia juga memiliki beberapa sungai, seperti Volga dan Dnepr. Ada juga Laut Hitam dan Laut Kaspia yang berbatasan langsung dengan Turki. (Robert Tjahyono Adi, 2007)

Boris Yeltsin adalah kepala pemerintahan Rusia saat Uni Soviet runtuh, menimbulkan harapan besar untuk reformasi politik. Untuk memenuhi keinginan masyarakat, Boris Yeltsin membuat kebijakan baru. Dengan melakukan reformasi ekonomi dan politik, Presiden Yeltsin mengubah pemerintahannya menjadi lebih demokratis.

Yeltsin melakukan reformasi politik dengan memberikan hak politik kepada masyarakat dalam pemilihan presiden dan Duma (Dewan Rakyat), melindungi hak-hak sipil, dan membebaskan media. Untuk liberalisasi ekonomi, pemerintah mempromosikan perusahaan milik negara dan meningkatkan ekonomi secara bertahap agar masyarakat

dapat beradaptasi dan mengikutinya, yang merupakan bagian dari reformasi ekonomi. Namun, harapan masyarakat tidak terpenuhi oleh reformasi ekonomi ini.

Sejarah budaya politik Rusia penuh dengan pemerintahan otoriter. Budaya politik yang dibawa demokrasi, yang lebih mengutamakan kebebasan dan mengandalkan partisipasi aktif masyarakat, gagal menjawab semua masalah yang muncul. Kemakmuran lebih penting daripada kebebasan hak asasi manusia. Kebebasan berbicara dan demokrasi tidak penting.

Munculnya kelompok oligarki adalah masalah dengan liberalisasi Presiden Boris Yeltsin. Kaum oligarki memperkuat posisi mereka karena mereka memainkan peran yang signifikan dalam pencalonan kedua Yeltsin, yaitu menyokong secara finansial kampanye Yeltsin. Pada kenyataannya, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan oligarki ini. Hasilnya, negara menjadi lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengawasi perusahaan swasta yang menguasai kekayaan alam.

Liberalisasi ekonomi Presiden Boris Yeltsin menyebabkan munculnya kelompok oligarki yang memperkuat posisi mereka dengan mendukung kampanye Yeltsin secara finansial. Pemerintah gagal mengendalikan oligarki, mengakibatkan negara lemah dan sulit mengawasi perusahaan swasta yang menguasai kekayaan alam. Krisis ekonomi Rusia pada 1998 memperburuk ketimpangan antara oligarki dan rakyat, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi liberal, dengan sebagian menganggap sistem komunis lebih baik karena jaminan kesehatan dan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Ukraina, negara pecahan Uni Soviet terbesar kedua setelah Rusia, memperoleh kemerdekaan pada 1917 dan bergabung dengan Uni Soviet pada 28 Desember 1922. Dengan luas sekitar 603.628 km², Ukraina terletak di tenggara Eropa dan merupakan negara perbatasan terbesar di Eropa, berbatasan dengan Hungaria, Moldova, Polandia, Belarus, Slovakia, Rumania, dan Rusia. (*Tentang Ukraina*, n.d.)

Ukraina, yang sebagian besar terdiri dari dataran, memiliki Dataran Rendah Dnepr yang membentang dari utara ke selatan dan Semenanjung Krimea di selatan dengan dataran rendah dan pegunungan rendah. Di selatan, terdapat dataran rendah di sepanjang pantai Laut Hitam dan Azov, sementara Pegunungan Carpathian membentang lebih dari 240 km di barat Ukraina. Sebagai republik demokratis, Ukraina memiliki sistem

pemilihan langsung untuk presiden, parlemen (Verkhovna Rada), walikota, utusan daerah, dan dewan kota. Undang-undang Dasar menetapkan jam kerja 40 jam per minggu, hak liburan tahunan, dan melarang diskriminasi berdasarkan pandangan politik atau kewarganegaraan.

Negara-negara pecahan Uni Soviet dan Eropa Timur sangat terpengaruh setelah runtuhnya Uni Soviet. Identitas Ukraina berubah secara signifikan sejak Ukraina menjadi negara yang merdeka. Pada tanggal 24 Agustus 1991, Ukraina menerima kemerdekaan yang diakui oleh seluruh dunia. CIS (*Commonwealth of Independent States*) didirikan oleh negara-negara Ukraina, Rusia, dan Belarusia pada Desember 1991. Ukraina tidak bergabung dengan CIS pada awalnya, meskipun merupakan salah satu negara pencetusnya. Ini karena Ukraina dan Rusia tidak setuju dengan gagasan CIS. Hingga Januari 1993, Perjanjian Belovezh tetap menjadi dasar konstituen utama CIS. Piagam CIS akhirnya mengadopsi konstituen baru setelah diusulkan. Piagam CIS mendefinisikan negara anggota sebagai negara yang meratifikasi Piagam CIS. Berikut adalah peta yang menggambarkan semua negara anggota CIS.

Piagam CIS terdiri dari 9 bagian dan 45 pasal yang membahas topik dari keanggotaan hingga pembiayaan CIS. Berdasarkan piagam tersebut tujuan utama dari CIS adalah, implementasi kerja sama di bidang politik, ekonomi, lingkungan, kemanusiaan, budaya dan bidang-bidang lainnya; pembangunan ekonomi dan sosial yang komprehensif dan seimbang antar negara anggota CIS dalam rangka mewujudkan kerja sama dan integrasi penuh; menjaga hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, norma hukum internasional dan dokumen *The Conference of Security and Co-Operation in Europe* (CSCE); kerja sama antar negara anggota dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif dalam mengurangi pengeluaran negara dibidang militer dan persenjataan, mengeliminasi nuklir dan senjata pemusnah masal lainnya, dan mencapai tujuan pelucutan senjata secara total; membantu warga negara anggota CIS dalam memperluas dan membebaskan komunikasi, kontak dan perpindahan antara warga negara anggota CIS; resolusi yang damai dalam penyelesaian sengketa dan konflik antar negara anggota CIS.

Menurut Lieven, dalam bukunya "*Ukraine and Russia: A Fraternal Rivalry*", hubungan Rusia dan Ukraina sangat kompleks dan secara historis sangat dekat. Lieven percaya bahwa kerja sama erat dengan Rusia adalah kunci untuk kemerdekaan Ukraina. Namun, Yaroslav Bilinsky, dalam bukunya "*Endgame in NATO's Enlargement: The Baltic States and Ukraine*", menyarankan agar proses ekspansi NATO dipercepat dengan memasukkan empat negara yang berada di perbatasan Rusia sebelah Barat (Latvia, Livonia, Estonia, dan Ukraina). Dia berpendapat bahwa hal ini akan membuat lingkungan keamanan lebih aman dan akan meningkatkan stabilitas di Eropa Timur dan Tengah. (Korostelina, 2013)

Pemerintah Ukraina berusaha meningkatkan kerjasama dengan Rusia dan hubungan dengan NATO, namun Moskow melihat kemerdekaan Ukraina sebagai fenomena sementara dan menganggap Ukraina sebagai bagian penting dari "lingkungan" Rusia. Ukraina kesulitan berorientasi pro-Barat karena kurangnya dukungan dari negara-negara Eropa Barat dan Tengah. Pada tahun 1993, Ukraina mencoba menciptakan zona stabilitas di Eropa Timur tetapi gagal. Presiden Leonid Kravchuk menggunakan nasionalisme untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan reformasi ekonomi dan berusaha menyeimbangkan kebijakan terhadap Rusia dan Barat, yang justru memperburuk hubungan dengan Rusia. Setelah Kravchuk, Leonid Kuchma, meski lebih pro-Rusia, tetap menjalankan politik luar negeri yang dipengaruhi oleh nasionalisme Ukraina.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) didirikan pada 4 April 1949 oleh 12 negara untuk melindungi keamanan negara-negara Barat dan mencegah penyebaran ideologi komunis oleh Uni Soviet selama Perang Dingin. Pasal V North Atlantic Treaty menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, yang berarti mereka akan mempertahankan diri sesuai dengan Piagam PBB. Sejak awal, NATO, yang sekarang memiliki 28 anggota dan menerapkan kebijakan pintu terbuka, terlibat dalam berbagai misi perdamaian dan memperluas ke Eropa Timur dengan memasukkan negara-negara seperti Yunani, Turki, dan negara Baltik. Hubungan Rusia dan Ukraina dimulai pada 14 Februari 1992 dengan penandatanganan protokol diplomatik dan Perjanjian Persahabatan pada 31 Mei 1997.

Namun, hubungan sering memburuk, terutama di bawah Viktor Yushchenko dan Viktor Yanukovich, dengan ketegangan meningkat setelah ekspansi NATO ke Eropa Timur pada 2014. Konflik Krimea muncul setelah Nikita Khrushchev memberikan Semenanjung Krimea ke Ukraina, yang memiliki mayoritas etnis Rusia. Pada 2014, Rusia melakukan intervensi militer di Krimea setelah kudeta di Ukraina, dan referendum pada 16 Maret 2014 menunjukkan dukungan besar untuk bergabung dengan Rusia, meskipun dianggap ilegal oleh banyak negara. Krimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada 18 Maret 2014, menambah kekhawatiran Rusia mengenai pengaruh NATO dan kepentingan strategis di Laut Hitam. (Setiyono, 2020)

Jika berbicara tentang kebijakan luar negeri Rusia dalam mempertahankan pengaruh keamanan di Krimea, peneliti juga perlu mendeskripsikan strategi militer yang digunakan oleh Rusia. Pembahasan ini akan mencakup kebijakan luar negeri Rusia berdasarkan kepentingan nasional, karena penelitian ini berfokus pada faktor yang mendorong Rusia dalam menyusun kekuatan pertahanan di wilayah Krimea.

Kebijakan Luar Negeri Rusia

Selama beberapa waktu, Rusia telah berkuasa di wilayah Ukraina. Ini karena Rusia mewarisi sebagian besar wilayah dan kekayaan Uni Soviet. Selain itu, Rusia memiliki kemampuan untuk bangkit dari kemerosotan dan menjadi negara super yang sangat dominan di Eropa Timur. Dengan berusaha mempersatukan dan mempengaruhi negara-negara di Eropa Timur, Rusia ingin menjadi negara adikuasa. Rusia tidak ingin kehilangan kendali atas negara-negara Eropa Timur, terlebih lagi negara-negara anggota Komunitas Internasional (CIS).

Ketika Vladimir Putin menjabat sebagai Presiden Rusia dari tahun 2000 hingga saat ini, kebangkitan militer dimulai. Anggaran militer telah meningkat lebih dari 9% dari PDB, menunjukkan hal ini. Data yang dirilis oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), lembaga internasional independen yang berbasis di Swedia yang menyelidiki konflik, persenjataan, pengawasan senjata, dan peluncuran senjata, menunjukkan bahwa Rusia pada tahun 2011 menghabiskan hampir US\$ 72 miliar untuk membeli senjata api. Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa Rusia berencana untuk terus meningkatkan anggarannya, dengan rencana kenaikan anggaran sebesar 55% hingga 2014.

Presiden Putin menyatakan pada tahun 2012 bahwa dia akan memberikan dana sebesar 23 triliun rubel selama sepuluh tahun mendatang untuk mencapai rencana untuk meningkatkan kekuatan militer Rusia. Lebih dari 600 pesawat tempur modern, lebih dari 400 rudal balistik antarbenua (ICBM), 2.300 tank, 8 kapal selam peluncur rudal balistik nuklir, 20 kapal selam serbu tradisional, dan 50 kapal perang tambahan telah ditambahkan sebagai bagian dari program penambahan. Selain itu, angkatan bersenjata Rusia akan membangun lebih dari 17.000 kendaraan militer, serta 38 divisi sistem pertahanan udara Vityaz, 10 brigade sistem rudal taktis Iskander-M, 28 resimen sistem rudal darat ke udara S-400 baru. Presiden Putin juga akan meningkatkan prestise Angkatan Bersenjata Rusia dengan meningkatkan jumlah prajurit profesional hingga 70%.

Rusia merasa terancam ketika mengetahui bahwa Barat tengah semakin berkembang, terutama dalam hal politik dengan memperluas keanggotaan NATO ke wilayah Ukraina. Ini disebabkan oleh fakta bahwa NATO adalah aliansi pertahanan Atlantik Utara yang didirikan oleh negara-negara Eropa Barat, bersama dengan Amerika Serikat. Rusia pasti tidak akan membiarkan Ukraina bergabung dengan NATO karena ingin menjadi negara adikuasa dan mengalahkan Amerika Serikat. Selain itu, selama Uni Soviet masih ada, Ukraina adalah anggota Pakta Warsawa, dan NATO adalah pesaingnya.

Presiden Viktor Yanukovych, yang mendukung Rusia pada saat itu, tidak ingin menandatangani referendum keanggotaan NATO karena menurutnya bantuan dari kerjasama dengan NATO tidak jauh lebih menguntungkan daripada bantuan dari Rusia. Presiden Yanukovych mengklaim bahwa itu hanya akan mempersulit Ukraina dan tidak akan memenuhi kebutuhan negara itu. Karena itu, masyarakat pro-Barat menentang Presiden Yanukovych dan melakukan kudeta. Di Kiev, konflik dan demonstrasi besar-besaran terjadi.

Demonstrasi di Kiev, Krimea



(Sumber: VOA Indonesia)

Dengan alasan untuk melindungi penduduk Rusia di Semenanjung Krimea, Rusia segera mengirimkan ribuan tentara ke sana. Aksi aneksasi Rusia di semenanjung Krimea pada Februari 2014 mengejutkan dunia. Kontrol atas semenanjung Krimea telah dilepaskan dari Ukraina. Akibat aneksasi, semenanjung Krimea secara de facto berada di bawah pemerintah Federasi Rusia, meskipun tidak diakui oleh PBB.

Aksi protes juga memfokuskan pada isu ideologi dan geopolitik yang membagi negara ke dalam dua bagian, yakni “Eropa vs Rusia” atau “*forward to the West vs. back to the USSR*”. Aksi ini mencapai puncaknya pada pertengahan Februari 2014 ketika kepolisian merespon aksi protes pro-Barat dengan cara konfrontatif yang justru membuat gelombang protes semakin besar. Sebagai konsekuensinya, pada 21 Februari 2014 Presiden Viktor Yanukovych meninggalkan ibukota negara, Kiev. (Kartini, 2014)

Pasukan pro-Rusia mengambil alih semenanjung Krimea pada 26 Februari 2014. Saat orang-orang bersenjata mengambil alih gedung parlemen Krimea, anggota parlemen memilih untuk memberhentikan pemerintahan, mengganti perdana menteri, dan menyerukan referendum mengenai otonomi Krimea. Tak lama kemudian, pada 16 Maret 2014, rakyat Krimea memilih untuk bergabung dengan pemerintah Federasi Rusia, dengan 96,77% dari wilayah Krimea dan 95,6% dari kota Sevastopol memberikan suara.

Uni Eropa, Amerika Serikat, Ukraina, dan Tatar Krimea menentang referendum ini karena dianggap melanggar hukum internasional. Parlemen Krimea memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Rusia pada 17 Maret 2014, mendeklarasikan

kemerdekaannya dari Ukraina. Perjanjian ditandatangani antara Rusia dan Republik Krimea pada 18 Maret 2014 untuk menggabungkan Republik Krimea dan Sevastopol ke dalam Federasi Rusia. Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 68/262 pada 27 Maret 2014, yang menyatakan bahwa referendum yang diadakan di Krimea tidak sah dan bahwa penggabungan Krimea ke dalam Rusia adalah ilegal. Pada 15 April 2014, parlemen Ukraina mengakui Krimea sebagai wilayah yang saat ini diambil alih oleh Rusia.

Kebijakan aneksasi memberi manfaat besar bagi Rusia. Ini karena Rusia dapat mengontrol aset militer, baik yang dimiliki Rusia maupun Ukraina di wilayah Krimea. Rusia memiliki banyak aset militer di Krimea, termasuk personel tentara, alutsista, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Asset-asset ini telah diperkuat sebagai bagian dari upaya Rusia untuk meningkatkan kekuatannya, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara anggota NATO.

Rusia menggunakan Krimea sebagai pangkalan militer dan armada laut untuk memantau rute pipa gas yang mengalir dari dan menuju negara tersebut karena lokasinya yang berdekatan dengan negara-negara ber-geopolitik strategis. Selain itu, Ukraina, yang secara politik dekat dengan Barat, digunakan Rusia untuk mengawasi negara sekutu. Rusia menempatkan pangkalan pentingnya di Krimea untuk melindungi keamanan dan kepentingan negaranya. Ini termasuk markas kapal perang, empat pangkalan militer, empat resimel misil pantai, dan banyak lagi pangkalan yang menampung ribuan tentara Rusia. Armada laut Hitan Rusia di Krimea memiliki 388 kapal perang Rusia, termasuk 14 kapal selam diesel. Selain itu, pangkalan udara Rusia yang di sewa di wilayah Sevastopol dan Gvardeiskoye memiliki 161 pesawat tempur. Secara keseluruhan, lebih dari 25.000 militer Rusia telah ditempatkan di Krimea.

Menurut departemen pertahanan Rusia, mereka memiliki kemampuan untuk memodernisasi pesawat militer mereka. Putin menyatakan bahwa Rusia tidak perlu membangun sistem pertahanan serupa dengan NATO di Eropa karena Rusia dapat berkonsentrasi pada pembuatan kekuatan nuklir strategis dan sistem pertahanan udara dan luar angkasa untuk melawan sistem perisai rudal NATO. Bagi Rusia, aneksasi Semenanjung Krimea adalah langkah pertama menuju kepentingan nasional dan kebangkitan Rusia di dunia. Presiden Putin ingin mengubah Rusia menjadi negara yang berpengaruh di dunia, bukan hanya di wilayahnya. Rusia ingin menegaskan posisi

pentingnya di dunia internasional dengan meningkatkan kekuatan militernya. Di Krimea, penjagaan Rusia terus diperketat. Pada tahun 2020, Rusia mengirimkan tiga kelompok militer ke wilayah perbatasan Ukraina. Dalam rapat online Forum Kerjasama Keamanan OSCE, Direktorat Kerjasama Militer dan Operasi Penjaga Perdamaian Angkatan Bersenjata Ukraina menyampaikan hal ini.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa setiap negara akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kepentingan dan kedaulatannya. Aneksasi Rusia atas Ukraina berakar pada keinginan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik serta keamanan wilayahnya dari ancaman NATO, yang dianggap sebagai perpanjangan pengaruh AS di Eropa Timur. Ketegangan memuncak setelah Presiden Ukraina Yanukovich, yang pro-Rusia, digulingkan oleh kelompok pro-Barat. Rusia merespons dengan menganeksasi Krimea, yang mayoritas penduduknya mendukung Rusia, serta memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut. Konflik ini terus berlanjut, dengan Rusia memodernisasi militernya untuk menghadapi ekspansi NATO, sementara ketegangan militer antara Rusia dan Ukraina meningkat hingga 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, D. (2022). *Ukraina Akui Serang Pangkalan Militer Rusia di Krimea*. Detiknews. Internet.
- Candradewi, R. (2023). *What Russia Wants For Ukraine Is To Consider Its Interest*. <https://id.scribd.com/doc/291652116/What-Russia-Wants-for-Ukraine-is-to-Consider-Its-Interest-Journal-Issue-Vol-1-No-01-6-March-20141>
- Hatton, D. (2010). *Did Orange Revolution Change Ukraine's Geopolitical Regarding Russia and The West ?*, University of Leeds. Vol 3.
- Kamasa, F. (n.d.). *Ukraine's Crisis and ITS Impact Towards Global and Regional Political System*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vol 11 No.
- Kartini, I. (2014). *Aneksasi Rusia di Krimea Dan Konsekuensi Bagi Ukraina*. *Jurnal Pusat Penelitian Politik, Volume 11*.
- Korostelina, C. (2013). *The Multiethnic State-building Dilemma: National and Ethnic Minorities' Identities in the Crimea, National Identities*. Vol. 5, No, 142.
- Muhammad, A. (2015). *Selamat Datang Perang Dingin! Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat*. *INSIGNIA, volume 2*.
- Oktorino, N. (2022). *Ukraina: The Road to Armageddon*. Elex Media Komputindo

- Robert Tjahyono Adi. (2007). *Mengenal 192 Negara di Dunia*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Saputra, A. R. (2014). *Dari Uni Soviet Hingga Rusia*. Jogjakarta : PALAPA.
- Setiyono, B. . S. & J. (2020). *Perubahan Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Rusia Di Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea. Volume 4,*.
- Sudibyoy, Lintang Wahyu, and T. C. U. (2018). Perjuangan Mengukuhkan Identitas Nasional: Aneksasi Rusia di Krimea dalam Perspektif Konstruktivisme. *Journal of International Relations*, 597–606.
- Tentang Ukraina*. (n.d.). Media Online. <http://old.uiec.org>
- Trisnawati Bandamiasih. (2015). *Respons Amerika Serikat Terhadap Keterlibatan Rusia Dalam Referendum Krimea Di Ukraina Tahun 2014*. UPN Veteran Yogyakarta.
- Walter, J. D. (2022). *Mengapa Kawasan Donbas di Ukraina Begitu Penting Bagi Putin?*
- D.W.Com. Internet. <https://www.dw.com/id/mengapa-kawasan-donbas-di-ukraina-begitu-penting-bagi-vladimir-putin/a-61559600>
- Wibowo, D. A. (2017). *Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing*. Diss. Brawijaya University.
- Yakti, M. P. D. (2016). *Kebutuhan Uni Eropa Terhadap Institusi Keamanan: Peranan NATO di Era Kontemporer*. *Jurnal Hubungan Internasional, IX, No.1*.